

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di negara berkembang, salah satunya yaitu negara Indonesia. Berbicara mengenai kemiskinan, kata kemiskinan nyatanya juga tidak bisa dilepaskan dari kata perempuan. Berdasarkan data yang ada, menunjukkan bahwa tidak sedikit perempuan berada di garis kemiskinan khususnya para kepala rumah tangga yang dipimpin oleh para perempuan miskin. Data dari BPS pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sebesar 16,12% atau sekitar 1 juta rumah tangga miskin di Indonesia dipimpin oleh perempuan dan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengatakan bahwa di tahun 2018 sekitar 17% perempuan di atas 15 tahun merupakan kepala rumah tangga tunggal (Data sekunder, diolah oleh penulis).

Dalam pendekatan gender, perempuan sering kali mengalami eksklusi sosial. Sehingga banyak perempuan mengalami ketidakberdayaan dan termarginalkan. Posisi perempuan dalam struktur sosial menempati posisi ke dua setelah laki-laki, laki-laki sering dianggap lebih berdaya dalam mengakses sumber daya sehingga memiliki peluang untuk mempengaruhi kekuasaan dan memperoleh kesempatan (Kusumastuti 2019). Disisi lainnya kondisi ini menyebabkan perempuan mengalami keterbatasan terhadap akses publik, informasi, sosial, bahkan aspek pendidikan juga ekonomi, implikasinya perempuan rentan terhadap kemiskinan.

Kuatnya eksklusi sosial yang dialami oleh perempuan diakibatkan adanya budaya yang turun menurun atau bahkan bisa dikatakan budaya nenek moyang yaitu budaya patriarki. Laki-laki dianggap berkuasa dan bertanggung jawab dalam urusan dunia kerja (menafkahi) sehingga akses publik atau dunia luar lebih mudah didapat dan dikases. Sedangkan perempuan dianggap hanya wajib bertanggung jawab pada pekerjaan domestik yang ada di dalam keluarga saja seperti berreproduksi, mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal jika perempuan diberi akses yang sama dengan laki-laki, perempuan juga bisa mengimbangi laki-laki untuk pekerjaan diluar rumah.

Salah satu isu mengenai kemiskinan pada perempuan yang berkembang di masyarakat adalah istilah Feminisasi Kemiskinan. Feminisasi Kemiskinan merupakan keadaan yang menggambarkan tentang sebuah kerentanan, ketidakberdayaan dan kegoyahan perekonomian yang sedang dialami dalam suatu keluarga karena hilangnya peran seorang ayah/ laki-laki yang menjadi kepala keluarga atau tulang punggung keluarga sehingga menjadikan seorang ibu menggantikan peran sebagai Kepala Rumah Tangga tunggal.

Feminisasi Kemiskinan muncul akibat beberapa faktor salah satunya karena seorang suami/ kepala keluarga meninggal dunia sehingga menjadikan seorang istri berstatus janda. Faktor lainnya yaitu keadaan yang kurang beruntung terjadi dimana suami mengalami kecacatan dan difabel yang tidak memungkinkan seorang suami bekerja sehingga berkurangnya pemasukan perekonomian keluarga dan mengharuskan perannya digantikan oleh ibu. Intinya

permasalahan Feminisasi Kemiskinan tersebut menyebabkan keadaan dimana semua kewajiban laki-laki dipindahkan kepada perempuan.

Dalam istilah feminisasi kemiskinan akhirnya melekat bahwa ibu harus memiliki beberapa peran diantaranya yaitu sebagai ibu rumah tangga yang mengatur rumah tangga dalam suatu keluarga (pekerjaan domestik) dan juga harus menjadi pencari nafkah tunggal untuk keluarga guna menanggung dan menyokong perekonomian keluarga menggantikan peran dari seorang ayah (Laksono).

Padahal di lapangan posisi perempuan untuk mendapatkan akses publik termasuk akses ekonomi susah dikarenakan isu gender kuat sekali dengan fenomena sistem patriarki yang menyebabkan seorang perempuan menjadi subordinat dan termarginalkan. Dalam kehidupan sosial perempuan semakin mengalami ketidakberdayaan pada situasi seperti ini. Kemiskinan pada perempuan yang disebabkan akibat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi dalam keluarga dapat dilihat dari terbatasnya akses publik, ketenagakerjaan, lama jam bekerja dan upah yang diterima perempuan berbeda dengan laki-laki. Kemiskinan pada perempuan juga disebabkan karena latar belakang, alasan, pengalaman dan kemampuan yang berbeda.

Sehingga akses yang didapatkan oleh kaum perempuan lebih kecil daripada akses yang didapatkan oleh laki-laki, misalnya saja untuk memperoleh pekerjaan (Ahmad, Kanto et al. 2015).

Berbicara tentang kemiskinan, tingkat kemiskinan di Indonesia lebih tinggi terjadi di wilayah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Presentase

penduduk miskin yang berada di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,69% (9,99 juta jiwa). Sedangkan untuk kemiskinan di wilayah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85% (15,15 juta jiwa). Jika digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan 2018-2019
Indonesia**

Daerah/tahun	Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (juta)	Prasentase
Perkotaan		
Maret 2018	10,14 juta	7,02%
September 2018	10,13 juta	6,89%
Maret 2019	9,99 juta	6,69%
Perdesaan		
Maret 2018	15,81 juta	13,20%
September 2018	15,54 juta	13,10%
Maret 2019	15,15 juta	12,85%

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2020

Penurunan angka kemiskinan yang terjadi di perkotaan maupun di perdesaan bukan berarti sepenuhnya pemerintah dikatakan berhasil dalam menekan angka kemiskinan (Maulana, Jainuri et al. 2019). Adanya permasalahan kemiskinan yang berkembang di masyarakat dan isu kemiskinan merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah, maka sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya dan pengentasan kemiskinan adalah salah satu pekerjaan utama bagi pemerintah.

Tuntutan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintahan Pusat saja, akan tetapi juga untuk Pemerintah ditingkat Daerah seperti Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa agar turut hadir ditengah-tengah

masayarakat agar berinovasi menciptakan sebuah program sebagai upaya penanganan kemiskinan bagi masyarakatnya (Pedoman Umum Jalin Matra Penanggulangan Fемinisasi Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2018). Sehingga diharapkan akan tercapai sebuah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan indikator terciptanya pertumbuhan ekonomi tinggi juga nantinya dapat diimbangi dengan penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial semakin rendah (Cendriono 2017).

Atas dasar tersebut, sebagai pelayan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur membuat kebijakan pengentasan kemiskinan berupa inovasi program pengentasan kemiskinan yang sifatnya program dekosentrasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dengan melakukan proses pembangunan manusia, pemberdayaan ekonomi yang sifatnya berkelanjutan dan berpusat pada rakyat dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dibidang sosial, pendidikan maupun ekonomi dan aspek gendernya. Kebijakan tersebut berupa program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera).

Program tersebut hadir saat kepemimpinan Gubernur Soekarwo dan Wakilnya Gus Ipul. Menyesuaikan dengan Visi Misi yang ada di RPJMD pada tahun 2014-2019 yaitu “Makin Mandiri Bersama Wong Cilik”, dengan fokus utama program-program yang diusung akan lebih berpihak pada “wong cilik” atau masyarakat yang dalam perekonomiannya kurang beruntung. Jalin Matra memiliki 3 produk unggulan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu Jalin

Matra Bantuan Rumah Tangga Miskin (BRTSM), Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2).

Dari uraian di atas, laporan penelitian ini nantinya akan lebih difokuskan pada upaya Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. Konsep Feminisasi ini diusung karena dengan keadaan di lapangan yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan perdesaan Jawa Timur tinggi, jumlah penduduk usia produktif menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih besar dari laki-laki dan disusul dengan geografisnya yang banyak wilayah perdesaan. Dan dengan adanya budaya patriarki yang sudah melekat di masyarakat, pastinya perempuan dianggap belum mampu mengembangkan potensinya terlebih para perempuan yang ada di perdesaan hingga pesisir. Untuk itu dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan memberikan program pengentasan kemiskinan ataupun program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.

Yang membedakan konsep program ini dari program pengentasan kemiskinan lainnya yaitu adalah konsep Feminisasi. Dimana upaya pengentasan kemiskinan difokuskan pada “perempuan” yang menjadi peran tunggal dalam suatu keluarga dan mengalami ketidakberdayaan dalam akses publik (ADIANTA 2015). Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dalam program Jalin Matra ini sasaran penerima bantuan diberdayakan dari sisi perekonomiannya dengan dimintai keterangan akan keinginan dan kebutuhan penerima untuk membantu kepala rumah tangga perempuan miskin agar bisa bangkit dari kemiskinan.

Dengan adanya suatu konsep program Feminisasi Kemiskinan tersebut, diharapkan perempuan sudah tidak lagi dijadikan obyek pembangunan tetapi subyek pembangunan yang bersifat mandiri dan berpihak pada permasalahan gender (Husna 2018).

Salah satu Kabupaten yang menerima Program Jalin Matra adalah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa program ini dikelola hingga masuk ke wilayah Pemerintah Desa. Kabupaten Malang mulai tersentuh dengan Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ini sejak tahun 2015 hingga sekarang di tahun 2019. Alasan Kabupaten Malang setiap tahunnya mendapatkan program tersebut adalah karena Kabupaten Malang memegang data jumlah penduduk dengan angka kemiskinan tertinggi di antara 37 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, berikut tabel yang dapat ditampilkan :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2019.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		
	2017	2018	2019
Kab. Malang	283.960	268.490	246.600

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2019

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan Pemerintah baik Provinsi, Kabupaten, Desa mampu memberikan kontribusi penurunan angka kemiskinan. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah untuk menekan angka kemiskinan yang ada di masyarakat, dengan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah tersebut yaitu

memberikan kesempatan atau bantuan hingga pemberdayaan kepada para perempuan miskin di pedesaan dan juga perkotaan untuk isu kesetaraan gender.

Dengan berpacu pada data PPFM 2015 yang dirilis oleh TNP2K (Tim Nasional Penanggulangan Perencanaan Kemiskinan) kita dapat melihat seberapa banyak jumlah Kelompok Rumah Tangga Perempuan yang tergolong miskin. Berikut PPFM 2015 yang dirilis oleh TNP2K dan dijadikan ujung tombak dalam mengelola data penerima bantuan pemberdayaan ekonomi Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur :

Tabel 3
Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan Kesejahteraan di bawah 40% di Provinsi Jawa Timur

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan			
	Usia < 45 th	Usia 45 – 59 th	Usia > 60 th	TOTAL
KEDIRI	4.301	12.687	25.689	42.677
MALANG	5.015	15.409	30.439	50.863
JEMBER	7.331	20.228	36.205	63.764
BANYUWANGI	4.217	13.464	31.970	49.651
PROBOLINGGO	6.168	13.163	18.850	38.181
PASURUAN	8.322	18.571	22.426	49.319
JOMBANG	3.589	10.744	22.349	36.682
SUMENEP	6.519	15.306	21.282	43.107
KOTA SURABAYA	5.685	15.360	17.984	39.029

Sumber : Data TNP2K 2019

Dari beberapa Kabupaten/Kota di atas, jumlah KRTP miskin Kabupaten Malang tertinggi nomor 2 setelah Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur. Dengan dasar permasalahan tersebut program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang sangat diperhatikan dan menarik untuk diteliti.

Dalam penanggulangan feminisasi kemiskinan pada program Jalin Matra sasaran KRTP penerima bantuan pemberdayaan ekonomi adalah KRTP dengan status kesejahteraan terendah 10%. Berdasarkan basis data PPLS 2011 yang dirilis oleh TNP2K menunjukkan jumlah KRTP tergolong miskin atau memiliki status kesejahteraan 10% terendah (Desil 1) di Jawa Timur sebesar 152.343 KRTP di 37 Kabupaten/Kota (Sumber : Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur, diakses pada 24 Oktober 2019 pukul 07:22) dengan rincian hanya 76.283 KRTP se Jawa Timur yang memenuhi target dan sebanyak 6.724 jiwa di Kabupaten Malang berstatus KRTP Desil 1 sebagai sasaran berdasar pada Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015.

Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang sendiri dimulai pada tahun 2015 dan berakhir di tahun 2019, telah menjangkau sasaran KRTP Miskin sebanyak 5.101 jiwa. Oleh karena itu program tersebut perlu diadakan evaluasi agar dapat dipertimbangkan apakah program tersebut layak dilanjutkan ditahun berikutnya atau tidak dan untuk menilai sejauh mana nilai dan dampak dari Program. Atau dalam evaluasi nanti dapat menjadi rujukan pemerintah kabupaten/kota untuk diadopsi konsepnya dalam upaya membidik kemiskinan berwajah perempuan. Mengingat program tersebut juga tidak sepenuhnya berjalan mulus karena juga terdapat beberapa faktor penghambat di dalamnya.

Dari alasan di atas, untuk mengetahui berjalannya hingga menilai dampak program tersebut dan menjawab rumusan masalah, dalam laporan penelitian ini

peneliti mengamabil judul penelitian “Evaluasi Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang diambil dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi Program Jalin Matra Penanggungan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang tahun?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang tahun ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini nantinya pasti ada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penulisan ini, maka tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui evaluasi program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam evaluasi program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang.

Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian nantinya diharapkan penulis dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Bagi Mahasiswa

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan kami sebagai mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang kami dapatkan selama ini dalam bangku perkuliahan dan memperoleh ilmu baru atau pengalaman praktis dalam pelaksanaan langsung di lapangan.

b) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat (khususnya masyarakat rentan dengan kemiskinan) bahwa pemerintah sedang melakukan upaya pemberdayaan dalam bidang ekonomi guna dapat dimanfaatkan sebagai upaya memberikan kesejahteraan masyarakat desa nya dibidang ekonomi.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis, digunakan sebagai penambah wawasan baru jika ingin melakukan Riset atau Penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Desa di bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Laporan akhir nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran guna mengukur efek suatu program, bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program tersebut jika digunakan dimasa datang dan dapat menilai kesesuaian program baik untuk tingkat Pemerintahan Daerah dan Kabupaten.

1.4 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual sendiri merupakan uraian pemunculan sebuah istilah atau konsep yang diambil dari judul penelitian. Berdasarkan pada judul “Evaluasi Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang Tahun 2017-2018” maka konsep yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan menurut Jones dalam buku Ismail Nahwawi (Nawawi 2009) adalah

“suatu kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat dari sebuah kebijakan yang telah dibuat atau sebuah aktivitas yang dirancang guna menimbang manfaat sebuah program dan proses pemerintahan yang telah dikerjakan”.

Jadi Evaluasi Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan mencakup substansi, implementasi dan dampak dari program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pihak Pemerintah Kabupaten Malang sebagai Sekretariat Daerah memiliki kewenangan untuk penyelenggara dan eksekusi Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.

Nantinya keberhasilan atau kegagalan program tersebut dapat diukur melalui indikator-indikator keberhasilan Program Feminisasi Kemiskinan itu sendiri berdasarkan pada Buku Pedoman Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur dan dapat menggunakan beberapa kriteria rekomendasi evaluasi

kebijakan oleh William Dunn yang indikatornya terdiri dari Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan (Nugroho 2011).

Dan harapan dari hasil Evaluasi Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang Tahun 2018-2019 ini adalah untuk mengukur sejauh mana keefektifan atau mengukur sejauh mana keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik dengan program pemberdayaan ekonomi Kelompok Rumah Tangga Perempuan (KRTP) Miskin sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari APBD Provinsi Jawa Timur.

b. Program Jalin Matra

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2019, perbaharuan dari Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2018 Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) adalah suatu kebijakan publik yang di dalamnya terdapat sebuah program yang sasaran atau fokusnya pada “wong cilik” atau masyarakat miskin sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan isi Rencana Pendek Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat itu pada tahun 2014-2019 ppada masa kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo dan Gus Ipul dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Program tersebut merupakan sebuah bentuk inovasi pelayanan publik yang responsif terhadap permasalahan kemiskinan juga berbasis gender di Jawa Timur. Program Jalin Matra merupakan program yang di desain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya (wong cilik) berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan memperhatikan Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM).

Program Jalin Matra terbagi menjadi 3 jenis produk, yaitu :

1. Program Jalin Matra BRTSM (Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin), dengan tingkat kesejahteraan terendah yaitu 1%-5% (Desil 1).
2. Program Jalin Matra PFK (Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan), dengan tingkat kesejahteraan 10% terendah (Desil 1).
3. Program Jalin Matra PK2 (Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan), dengan tingkat kesejahteraan terendah 11%-20% (Desil 2-Desil 3).

c. Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan

Feminisasi Kemiskinan adalah keadaan yang menggambarkan ketidakberdayaan, kegoyahan ekonomi bahkan sosial yang dialami oleh Ibu Rumah Tangga karena harus menyokong kehidupan keluarga secara ekonomi dan menyebabkan dia menjalankan fungsi ekonomi juga sosial. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu ditinggal mati, cerai atau tidak dinafkahi oleh suami lebih dari enam bulan dan keadaan suami yang tidak memungkinkan untuk bisa mencari nafkah (suami difabel atau cacat) dan menjadikan status perempuan tersebut adalah Kepala Rumah Tangga Perempuan (Laksono).

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan adalah sebuah program yang didesain khusus untuk mengoptimalkan usaha pemerintah dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan bagi rumah tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) di perdesaan yang sifatnya responsif gender (Wulan, Ati et al. 2019). Tujuan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) diantaranya adalah;

(1) Memberikan akses untuk para Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan bantuan peran dari Kader TP-PKK dalam pengoptimalisasian sebagai *mother care* (pendamping) bagi KRTP; (2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk Rumah Tangga Sasaran Kepala Rumah Tangga Perempuan untuk memperluas akses dalam meningkatkan usaha ekonomi produktif guna pendapatan untuk keluarga; (3) Memberdayakan KRTP untuk mendorong ketahanan ekonomi juga sosial guna memenuhi kebutuhan hidup dasar keluarga; (4) Memberikan dorongan berupa motivasi untuk terus berusaha dan memberikan *life skill* kepada KRTP dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraannya (Utomo and Haryani 2019).

1.5 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah konsep yang berisikan indikator-indikator yang dapat menunjukkan konsep yang dimaksud, sehingga dapat mengoperasionalkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Adapun yang indikator-indikator yang akan didefinisikan secara operasional pada penelitian ini adalah :

- 1) Evaluasi Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang :
 - a. Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)
 - b. Aktor-Aktor Yang Terlibat dan Perannya dalam Program Jalin Matra PFK di Kabupaten Malang.
 - c. Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.

- d. Proses Monitoring dalam Pelaksanaan Penyaluran Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang.
 - e. Hasil Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Kabupaten Malang.
- 2) Faktor Penghambat Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Kabupaten Malang
- a. Validitas data kurang valid
 - b. Kurangnya jiwa berusaha para KRTP
 - c. Terbatasnya Anggaran Dana Pemerintah Provinsi

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dimana dengan penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dengan realita yang ada setelah melakukan penelitian turun lapang langsung untuk memberi gambaran pada penyusunan laporan (Ahmadi 2014). Data-data tersebut diperoleh dengan metode kualitatif yang nantinya data yang akan dikumpulkan bukan sepenuhnya berupa data angka dari hasil kuisioner, namun data dikumpulkan berupa tabel, data angka yang sudah ada, kata-kata, gambar dan bukan sepenuhnya angka seperti hasil wawancara, dokumentasi resmi berupa foto dan catatan lapangan (Moleong).

Alasan saya memilih metode ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, nantinya dalam penulisan laporan akhir, saya sebagai peneliti dapat menggambarkan hasil penelitian mengenai evaluasi sebuah program dengan

menggunakan kata-kata tertulis yang ditunjang dari data-data yang ada dan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperkuat hasil laporan pembahasan. Guna untuk menambah data-data yang saya butuhkan tersebut, saya melakukan turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian deskriptif ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara peneliti melakukan turun lapang langsung atau observasi ke subjek penelitian dan wawancara di lokasi penelitian yaitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga beberapa pihak yang berkaitan dengan program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Malang guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah di atas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Maksudnya disini saya sebagai peneliti mencoba mencari data untuk refrensi melalui bacaan-bacaan yang berkaitan langsung dengan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, misalnya data tersebut bisa didapatkan melalui Pedoman Umum Jalin Matra PFK, kemudian jurnal-jurnal yang berkaitan langsung dengan Program tersebut dan data-data yang telah

tersedia di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti bisa dari hasil wawancara kepada narasumber, observasi langsung ke lapangan untuk mencari data di lapangan guna memperoleh gambaran dan jawaban sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan. Pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan langsung atau turun lapang langsung kepada subjek penelitian yang saling berkaitan. Guna untuk memahami realita yang ada agar dapat mendapatkan jawaban sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara disini adalah percakapan atau interview peneliti dengan orang lain sebagai narasumber, salah satunya disini yaitu Kasie Bidang Usaha Sektor Informal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penanggung jawab dari Pemerintah Provinsi untuk melakukan implementasi dan eksekusi Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan hingga proses Monitoring dan Evaluasi Program ditingkat Kabupaten. Kemudian wawancara dapat dilakukan kepada Pendamping Desa sebagai *mothercare* yang mana mereka sifatnya lebih dekat dengan KRTP dan wawancara juga bisa dilakukan

kepada beberapa Kelompok Rumah Tangga Perempuan penerima bantuan untuk mengetahui dampak yang dirasakan dengan adanya program tersebut.

c. Dokumentasi

Untuk menunjang turun lapang yang telah dilakukan tersebut, hal yang tidak kalah penting yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode dimana mencari data-data dari catatan buku, transkrip, foto-foto surat ataupun arsip-arsip yang ada di tempat penelitian yang sedang diteliti dan dokumentasi berupa kegiatan-kegiatan turun lapang atau observasi yang telah peneliti lakukan. Dengan adanya dokumentasi, si peneliti nantinya diharapkan mampu untuk menganalisa dan menjelaskan maknanya, serta adanya pembuktian bahwa peneliti melakukan kegiatan observasi langsung.

4. Subyek Penelitian

Untuk menentukan subyek atau narasumber dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* yang maksudnya subyek penelitian dipilih secara sengaja oleh peneliti dan sudah dipertimbangkan oleh peneliti siapa saja yang nantinya akan dijadikan narasumber untuk diwawancarai dalam mengumpulkan data sesuai dengan kapasitasnya yang paling mengerti tentang permasalahan tersebut. Harapannya agar mempermudah peneliti dalam memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun subyek atau narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Kasie Sektor Usaha Informal Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.
- b. Pendamping Desa atau *Mothercare* di Kabupaten Malang

- c. Kelompok Rumah Tangga Sasaran (KRTP) Penerima Program Jalin Matra PFK.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang yang berlokasi di Jalan Merdeka Timur Nomor 3 Malang, Gedung C Lantai 3.

6. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan data kedalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelola, menggambarkan, memaparkan mengelola serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat kita sendiri sebagai jawaban atas masalah yang diteliti (Sugiyono 2012). Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan model analisis data dari Milles dan Huberman yang dilakukan sejak awal penelitian hingga pelaksanaan akhir suatu penelitian. Model analisis data kualitatif oleh Milles dan Huberman adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Pada mulanya sebuah data di lapangan diidentifikasi terlebih dahulu. Data tersebut nantinya akan dipilih bila maknanya dapat dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari lapangan atau dapat dikatakan peneliti mulai memilah dan mengolah data-data mentahan untuk

dijadikan pedoman dalam proses penyusunan laporan nantinya. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Dalam penyajian data ini nantinya peneliti sudah bisa menggambarkan akan bagaimana data tersebut untuk ditarik kesimpulannya.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah yang terakhir dalam Analisa Data Kualitatif adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah direduksi atau memverifikasi keabsahan data tersebut. Jika dirasa data yang ada sudah mencukupi dan kuat, peneliti segera melakukan penarikan kesimpulan untuk diolah dalam laporan penelitian.

